

Analisis Kejelasan Anggaran, Efektivitas Kinerja Anggaran & Pengawasan Keuangan Dalam Pelaksanaan APBD Tahun 2022 Kota Blitar

Theresia Uli Sianturi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email : theressiasianturi@gmail.com

Hwihanus

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: hwihanus@untag-sby.ac.id

Koresponden Penulis : hwihanus@untag-sby.ac.id

Abstract. *This research aims to analyze budget clarity, the effectiveness of the budget team's performance, and regional financial supervision in overcoming implementation problems related to the implementation of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) for Fiscal Year 2022 in Blitar City. With a comprehensive analytical approach, this research identifies critical factors that influence the success of APBD implementation, evaluates the level of budget clarity, measures the effectiveness of the budget team's performance, and assesses the role of regional financial supervision. It is hoped that the research results will provide in-depth insight for stakeholders in improving regional financial management and overcoming practical obstacles that may arise in the implementation of the 2022 APBD in Blitar City.*

Keywords: *Accounting Public Sector, budget clarity, financial supervision*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kejelasan anggaran, efektivitas kinerja tim anggaran, dan pengawasan keuangan daerah dalam mengatasi masalah implementasi terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 di Kota Blitar. Dengan pendekatan analisis menyeluruh, penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor kritis yang memengaruhi keberhasilan implementasi APBD, mengevaluasi tingkat kejelasan anggaran, mengukur efektivitas kinerja tim anggaran, dan menilai peran pengawasan keuangan daerah. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam bagi pemangku kepentingan dalam meningkatkan manajemen keuangan daerah dan menanggulangi hambatan-hambatan praktis yang mungkin timbul dalam pelaksanaan APBD 2022 di Kota Blitar.

Kata kunci: Akuntansi Sektor Public, Kejelasan Anggaran, Pengawasan Keuangan

LATAR BELAKANG

Rendah tingkat penyerapan anggaran di Daerah hampir setiap tahunnya terjadi, hal yang membuat rendahnya penyerapan anggaran yaitu kemampuan perencanaan yang kurang efektif, terdapat perubahan regulasi dalam kebijakan pemerintah yang dapat menghambat pelaksanaan proyek/penggunaan anggaran, pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam hal kapasitas Sumber Daya Manusia (SDA), dan kurangnya transparansi dalam penggunaan anggaran dalam pengelolaan dana public. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial (Mardiasmo, 2009). Sehingga, dalam penganggaran sector public lebih memperhatikan efisien dan ekonomis agar dana anggaran yang telah disusun bisa berjalan sesuai target yang telah

ditentukan. Jika penyerapan anggaran masih terbilang rendah bisa dinyatakan terdapat temuan bahwa masih belum optimal peran pemerintah dalam berkontribusi terhadap total pendapatan dalam negeri.

Sebelum dikeluarkannya UU No. 22/1999 dan ditetapkannya UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, Pada awalnya, DPRD tampaknya hanya berperan dalam memberikan persetujuan untuk rancangan anggaran yang diajukan oleh eksekutif. Namun, sekarang DPRD telah meningkatkan perannya karena memiliki kewenangan yang lebih besar dalam menentukan anggaran, termasuk mengendalikan penggunaannya.

Namun di sisi lain, dengan adanya otonomi daerah, telah terjadi perubahan dan muncul paradigma baru dalam proses penyusunan anggaran. oleh karena itu, transparansi dan partisipasi dalam proses anggaran telah mengalami peningkatan. Salah satu implikasi dari pelaksanaan kedua undang-undang tersebut adalah perlunya wilayah untuk secara efektif memajukan konsep otonomi daerah, yang mencakup keterlibatan yang jelas dan bertanggung jawab dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Selain itu, munculnya persyaratan kepada pemerintah untuk menciptakan tata kelola yang baik sebagai syarat utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan menekankan keterbukaan dan akuntabilitas publik.

Pihak yang memiliki kewenangan dalam menyusun APBD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), yang kemudian harus meminta persetujuan dari DPRD. Namun, dalam proses penyusunan APBD, perbedaan dalam kepentingan partai politik di DPRD memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan TAPD, karena mencerminkan visi misi pemerintah daerah yang relatif seragam. Pengelolaan anggaran daerah dalam implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki peran yang penting dalam hal mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan penting bagi pelayanan public yang optimal. Pada tahun anggaran 2023 Kota Blitar sebagai salah satu pemerintahan daerah yang sedang melaksanakan APBD dalam melaksanakan proyek memiliki kendala di masing-masing bidang (Dinas).

Pengawasan keuangan daerah adalah instrumen penting untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan aturan. Kurangnya pengawasan yang efektif dapat membuka peluang untuk penyalahgunaan dana dan pelaksanaan program yang tidak efisien. Oleh karena itu, sistem pengawasan keuangan daerah yang kuat sangat diperlukan untuk menjamin akuntabilitas dan efisiensi penggunaan dana public

KAJIAN TEORITIS

Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik adalah cabang dari akuntansi yang berfokus pada pengukuran, pelaporan, dan analisis keuangan dalam konteks organisasi pemerintahan dan lembaga-lembaga sektor publik. Ini mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dana publik, pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan, serta pengukuran kinerja organisasi sektor publik. Akuntansi sektor publik memiliki peran penting dalam menjaga integritas keuangan pemerintah, organisasi sektor publik, dan lembaga-lembaga lain yang melayani kepentingan masyarakat. Hal ini juga berkontribusi pada tata kelola yang baik dan pengawasan dana publik.

A. Pengertian akuntansi sektor publik lebih lanjut mencakup:

a. Pengelolaan Dana Publik

Memantau dan mengelola dana yang diperoleh dari pendapatan pajak, hibah, atau sumber dana publik lainnya untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan pemerintah atau organisasi sektor publik.

b. Pelaporan Keuangan

Menyusun laporan keuangan yang mencakup neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan catatan terkait untuk memberikan gambaran yang jelas tentang keadaan keuangan dan hasil organisasi sektor publik.

c. Akuntabilitas dan Transparansi

Memastikan bahwa organisasi sektor publik bertanggung jawab atas penggunaan dana publik dan menjelaskan bagaimana dana tersebut digunakan kepada publik dan pihak berwenang.

d. Pengukuran Kinerja

Mengukur kinerja organisasi sektor publik dalam mencapai tujuan dan misi mereka serta memastikan efisiensi penggunaan sumber daya.

B. Manfaat akuntansi sektor publik:

a. Membantu dalam pengambilan keputusan

Informasi keuangan yang akurat membantu pemangku kepentingan, termasuk pemimpin pemerintah, dalam mengambil keputusan yang cerdas dan berdasarkan data. Mendorong tata kelola yang baik

Memastikan bahwa dana publik digunakan dengan transparan, efisien, dan sesuai dengan kebijakan dan tujuan yang telah ditetapkan.

b. Memungkinkan perbandingan dan evaluasi

Dengan laporan keuangan yang konsisten dan terstruktur, pemangku kepentingan dapat membandingkan kinerja organisasi sektor publik dari waktu ke waktu.

Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan (*compliance theory*) adalah pendekatan dalam ilmu sosial yang berfokus pada pemahaman mengapa individu atau organisasi mematuhi peraturan, kebijakan, atau norma yang ditetapkan oleh otoritas atau pihak yang berwenang. Teori kepatuhan mencoba menjawab pertanyaan tentang faktor-faktor apa yang memotivasi atau menghambat seseorang atau suatu entitas untuk mematuhi aturan.

Teori kepatuhan digunakan dalam berbagai konteks, termasuk hukum, manajemen, psikologi, dan ilmu politik. Penerapan teori kepatuhan membantu pemerintah dan organisasi merancang kebijakan yang lebih efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan norma yang telah ditetapkan.

Pengertian APBD

APBD adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Ini adalah rencana keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah atau pemerintah provinsi untuk mengatur pengeluaran dan penerimaan dalam suatu wilayah atau daerah tertentu. Peraturan Daerah digunakan untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Indonesia, yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah. APBD berlaku selama satu tahun, dimulai dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember. Yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

APBD merinci bagaimana pemerintah daerah akan mendapatkan pendapatan dan bagaimana mereka akan menghabiskan uang tersebut untuk membiayai berbagai program dan proyek.

Komponen utama APBD meliputi:

1. Pendapatan Daerah

Ini mencakup semua sumber pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah, seperti pajak, dana perimbangan dari pemerintah pusat, hasil investasi, dan sumber- sumber pendapatan lainnya.

2. Belanja Daerah

Ini mencakup rencana pengeluaran pemerintah daerah, termasuk biaya operasional, investasi dalam infrastruktur, dukungan untuk program sosial, dan berbagai kegiatan pemerintah lainnya.

3. Surplus atau Defisit

Selisih antara pendapatan dan belanja daerah akan menghasilkan surplus atau defisit. Surplus terjadi jika pendapatan melebihi belanja, sementara defisit terjadi jika belanja melebihi pendapatan.

Pengertian Anggaran

Anggaran dalam menjalankan operasi perusahaan ialah sebagai alat akuntansi yang berperan penting bagi manajemen untuk membantu pimpinan dalam perencanaan dan pengendalian kegiatan perusahaan. Anggaran mencerminkan rencana penggunaan sumber daya yang diantisipasi selama periode tertentu. Selain itu, anggaran digunakan untuk mengawasi dan mengarahkan aktivitas, serta menjadi alat pembanding untuk menilai hasil pelaksanaan tindakan dalam memastikan bahwa proses pelaksanaan dapat diawasi dan dikendalikan dengan baik.

Namun, juga dapat dipahami bahwa anggaran merujuk pada perencanaan yang telah diatur dengan rapi, mencakup seluruh aktivitas perusahaan yang diungkapkan dalam unit mata uang yang berlaku untuk jangka waktu atau periode tertentu, serta perusahaan yang dinyatakan dalam unit mata uang yang berlaku untuk jangka periode yang akan datang.

Efektivitas Kinerja

Efektivitas kinerja merujuk pada sejauh mana suatu organisasi, tim, atau individu mencapai tujuan atau hasil yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan sumber daya yang digunakan. Ini adalah ukuran seberapa baik suatu entitas atau individu dalam mencapai hasil yang diinginkan dengan efisien dan efektif. Efektivitas kinerja biasanya mengukur "melakukan hal yang benar" daripada "melakukan hal itu dengan benar," yang merupakan

fokus dari efisiensi. Dalam konteks bisnis atau manajemen, efektivitas kinerja mencakup pencapaian tujuan strategis, memenuhi kebutuhan pelanggan, dan menghasilkan nilai yang diharapkan.

Pelaksanaan Anggaran

Menurut BPKP (2011) Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk merealisasikan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan. Dalam proses pelaksanaan melibatkan pengaturan tentang penggunaan alat-alat yang dibutuhkan, identifikasi pelaksana, metode pelaksanaan, jadwal pelaksanaan, serta tempat pelaksanaan. Dengan dasar konsep ini, pelaksanaan anggaran mencakup upaya-upaya untuk mengaktualisasikan perencanaan anggaran yang telah dibuat dengan mempertimbangkan masalah-masalah yang muncul di dalam organisasi. Sehingga, pelaksanaan anggaran harus :

1. Memastikan bahwa pelaksanaan anggaran akan sesuai dengan wewenang yang diberikan, baik dalam hal keuangan maupun kebijakan.
2. Menyesuaikan pelaksanaan anggaran dengan perubahan ekonomi makro yang signifikan
3. Mengidentifikasi masalah yang timbul selama pelaksanaan.
4. Mengelola akuisisi dan pemanfaatan sumber daya dengan efisien dan efektif.

Sistem pelaksanaan anggaran perlu memastikan kepatuhan terhadap wewenang anggaran, mampu melakukan pengawasan dan pelaporan yang mendeteksi masalah pelaksanaan anggaran, serta memberikan kelonggaran bagi para manajer.

Efektivitas pelaksanaan anggaran sangat bergantung pada sejumlah faktor, termasuk kemampuan untuk menghadapi perubahan dalam konteks ekonomi makro serta kemampuan unit kerja (satker) untuk melaksanakannya. Pelaksanaan anggaran melibatkan lebih banyak individu daripada proses persiapannya, dan melibatkan evaluasi dari pengalaman praktis yang sesungguhnya.

Pengawasan

Pengawasan adalah proses yang melibatkan pengamatan, pengendalian, dan evaluasi untuk memastikan bahwa aktivitas atau proses tertentu berjalan sesuai dengan rencana, standar, atau aturan yang telah ditetapkan. Ini mencakup pemantauan terhadap kinerja, kepatuhan, dan hasil yang diperoleh dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengawasan biasanya digunakan untuk mengidentifikasi masalah, perbaikan, atau perubahan yang diperlukan dalam suatu organisasi atau sistem.

Pengawasan dapat dilakukan dalam berbagai konteks, termasuk bisnis, pemerintahan, pendidikan, dan sektor lainnya. Tujuannya adalah untuk memastikan akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang ada. Ini adalah salah satu elemen penting dalam manajemen dan pengelolaan sumber daya yang efisien.

Berikut penulis akan menyajikan beberapa pendapat para ahli mengenai pengawasan. Untuk lebih jelasnya pengertian pengawasan dijelaskan Panglaykim dan Hazil, Manajemen Sumber Daya Manusia, (1997: 123) menyatakan bahwa Control tidak berarti mengontrol saja, ia meliputi juga aspek penelitian; apakah yang dicapai itu sesuai dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan lengkap dengan rencana, kebijaksanaannya program dan lain-lain sebagainya dari pada management.

Sedangkan menurut M. Manullang, Manajemen Personalia, (1998: 87), memberikan batasan pengertian sebagai berikut, internal control sebagai suatu proses untuk menetapkan pekerjaan yang mudah dilaksanakan menilai dan mengoreksi kita bila perlu membuat supaya pelaksanaan pekerjaan sesuatu sesuai dengan rencana semula.

Selanjutnya Martoyo Susilo, Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja (1998: 134) yang dijelaskan mengenai pengertian pengawasan (terjemahan), menyatakan bahwa controlling dapat didefinisikan sebagai proses yang memetingkan apa yang dilakukan, yaitu standar apakah yang sedang dilakukan, yaitu pekerjaan; menilai pekerjaan itu dan jika perlu menggunakan ukuran-ukuran perbaikan oleh sebab itu pekerjaan yang berlangsung sesuai dengan rencana, yaitu sesuai dengan standar.

Pengawasan adalah alat yang penting dalam mencapai kontrol, pemantauan, dan pengelolaan yang efektif dalam berbagai aspek kehidupan dan bisnis. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan, standar, atau target yang telah ditetapkan, dan untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang mungkin muncul selama proses tersebut.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian

Pada desain penelitian ini informasi yang akan digunakan adalah informasi yang berkaitan dengan penerapan system informasi akuntansi terhadap Kejelasan Anggaran, Efektivitas Kinerja Tim Anggaran & Pengawasan Keuangan Daerah Dalam Memecahkan Masalah Implementasi Tentang Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 di Kota Blitar.

Penelitian ini melakukan pengolahan data melalui metode kualitatif dengan data berupa wawancara, observasi, dan study research. Karena peneliti ingin menemukan fakta tentang Memecahkan Masalah Implementasi Tentang Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran di Kota Blitar.

Desain penelitian yang digunakan penelitian ini adalah desain penelitian deskriptif kualitatif karena peneliti ingin mengetahui kejelasan anggaran tentang pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 di Kota Blitar. Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer.

Tempat dan waktu

Lokasi penelitian merupakan tempat yang berkaitan dengan sasaran dan merupakan salah satu jenis sumber data yang dapat dimanfaatkan oleh peneliti. Penelitian ini dilakukan di kota Blitar dan tertuju pada badan (lembaga) terkait, yakni Kantor DPRD Kota Blitar. Sedangkan waktu yang telah digunakan untuk melakukan penelitian ini selama dua bulan yaitu pada bulan September - Desember 2023.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah data kualitatif dengan cara wawancara, penulis meneliti secara langsung pada obyek penelitian dengan cara menyusun daftar pertanyaan, dan mengadakan wawancara langsung pada bagian pengawasan dan penganggaran di Kantor DPRD Kota Blitar.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Anggota Dewan DPRD dan pegawai sekretariat DPRD. Sampel yang diambil sebanyak 5 orang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Alasan menggunakan teknik Purposive Sampling adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, penulis memilih teknik Purposive Sampling yang menetapkan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria- kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel-sampel yang digunakan dalam penelitian ini.

Teknik Pengumpulan data

Dalam mengoptimalkan hasil yang dilaporkan oleh penulis sesuai dengan realitas, penulis memanfaatkan metode pengumpulan data melalui :

1. Observasi

Metode observasi adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara mengamati dan mencatat fenomena yang sedang diselidiki secara langsung. Metode observasi ini digunakan untuk menghimpun informasi mengenai situasi objek di Kantor DPRD Kota Blitar, termasuk data-data keuangan, data penganggaran, dan data pengawasan keuangan.

2. Wawancara

Proses pengumpulan data melibatkan interaksi melalui wawancara dengan individu yang terlibat dalam penelitian. Wawancara ini dilakukan dalam bentuk sejumlah pertanyaan yang dirancang untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, metode wawancara yang diterapkan adalah interview bebas terpimpin. Dalam interview ini, pewawancara membawa kerangka pertanyaan sebagai panduan, namun pendekatan ini cukup fleksibel dan tidak terikat ketat pada struktur tertentu. Ada juga penggunaan wawancara tidak berstruktur, di mana hanya garis-garis besar pertanyaan yang digunakan sebagai pedoman.

3. Study Research

Teknik pengumpulan data merupakan unsur yang penting dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan melalui membaca penelitian terdahulu (study research). Peneliti akan membuka dan membaca artikel/jurnal/dokumen dan tesis/skripsi di internet atau di perpustakaan.

4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian. Dokumen tersebut dapat berupa anggaran pemerintah daerah dan laporan keuangan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggunaan Anggaran di Kota Blitar

Pendapatan diakui pada saat diterima dan dicatat dalam Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Proses pengakuan ini melibatkan pencatatan setiap penerimaan pendapatan pada akun khusus dalam buku kas yang merupakan bagian dari sistem akuntansi entitas pemerintahan. Pendapatan yang diterima menjadi bagian integral dari Rekening Kas Umum

Negara/Daerah, yang mencerminkan transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen keuangan pemerintahan. Dengan mengakui pendapatan pada saat diterima, entitas dapat memantau dengan tepat arus kas masuk yang berkontribusi pada keberlanjutan operasional dan pelaksanaan program-program pemerintah.

Jumlah pendapatan pada Kota Blitar selama 2 tahun mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebesar Rp297.618.527.754,02 sedangkan pada tahun 2022 pendapatan mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp156.268.172.003,52.

Pada saat ini, penggunaan anggaran di Kota Blitar dapat dianggap efektif dan efisien, yang dapat dilihat dari keberhasilan dalam mengelola Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) yang sesuai dengan peruntukannya. Bukti nyata terlihat dari pencapaian realisasi anggaran pada tahun 2022 sebesar 88,06% dan tahun 2021 sebesar 93,6%. Adanya SILPA kegiatan yang tepat menunjukkan bahwa alokasi anggaran dilakukan dengan cermat dan efisien, mencerminkan komitmen dalam pengelolaan keuangan yang baik di tingkat pemerintahan Kota Blitar.

Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Dalam Pengelolaan di Kota Blitar

Perencanaan anggaran dalam suatu organisasi perlu dirancang secara terstruktur, mencakup semua kegiatan organisasi, diungkapkan dalam satuan uang, dan berlaku untuk periode waktu yang akan datang. Tahap penganggaran menjadi krusial karena anggaran harus didasarkan pada pencapaian kinerja organisasi, sehingga perencanaan yang telah dibuat dapat terlaksana. Anggaran berfungsi sebagai rencana manajerial untuk tindakan guna memfasilitasi pencapaian tujuan organisasi.

Perencanaan dan pelaksanaan di Kota Blitar terjalin sesuai dengan tata pemerintahan yang berlaku, di mana kegiatan dilaksanakan dengan merujuk pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebagai panduan utama. RKP menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun KUA-PPAS dan APBD, menciptakan kerangka kerja yang ter-arah. Selain itu, pemerintah juga mengimplementasikan program Rencana Kerja Jangka Menengah Daerah (RENJA), yang sendiri merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD ini dibentuk berdasarkan visi misi Kepala Daerah dan harus terhubung dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang mencakup periode 20 tahun. Dengan demikian, proses perencanaan kegiatan dan keuangan dalam anggaran pemerintah Kota Blitar memperlihatkan prioritas yang berbeda setiap tahunnya, sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah diatur sejak awal penyusunan RENJA.

Pelaksanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran

Pelaksanaan anggaran di Kota Blitar memiliki dampak positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran. Ketika anggaran dijalankan dengan efektif dan efisien, hal tersebut berkontribusi secara positif terhadap kemampuan organisasi atau entitas dalam menyerap dan menggunakan anggaran yang telah dialokasikan. Proses pelaksanaan yang baik mencerminkan keteraturan dan keberhasilan dalam implementasi rencana keuangan, sehingga anggaran dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Penyerapan anggaran yang positif berarti bahwa dana yang telah dialokasikan benar-benar digunakan untuk mendukung kegiatan dan program yang telah direncanakan, meningkatkan kinerja organisasi, dan mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan rencana anggaran yang telah disusun. Dengan demikian, efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan program atau kegiatan akan mendukung penyerapan anggaran yang optimal, di mana setiap dana yang telah disediakan digunakan secara tepat dan maksimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan anggaran.

Perencanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran

Perencanaan anggaran di Kota Blitar memiliki dampak positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran. Dengan adanya perencanaan anggaran yang matang, pemerintah Kota Blitar dapat dengan lebih akurat mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas dalam setiap sektor atau kegiatan. Hal ini menciptakan dasar yang kokoh untuk pelaksanaan anggaran yang optimal, di mana setiap dana yang telah dialokasikan dapat dimanfaatkan secara tepat guna. Dampak positif tersebut terlihat dalam peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program-program kota, serta tercapainya target penyerapan anggaran sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, perencanaan anggaran yang baik di Kota Blitar berkontribusi secara nyata terhadap kesuksesan penyerapan anggaran yang mendukung pembangunan dan kemajuan kota tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dilihat dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa analisis pengawasan keuangan terhadap efektifitas penggunaan anggaran di Kota Blitar dalam merealisasikan APBD tergolong efektif karena dapat dilihat dari tahun ke tahun memiliki peningkatan. Secara keseluruhan, baik pelaksanaan maupun perencanaan anggaran di Kota Blitar memberikan dampak positif terhadap penyerapan anggaran. Keteraturan, keberhasilan

implementasi rencana keuangan, dan peningkatan efisiensi pelaksanaan program-program kota menciptakan dasar yang kokoh untuk kesuksesan penyerapan anggaran, yang pada gilirannya mendukung pembangunan dan kemajuan kota tersebut..

DAFTAR REFERENSI

- Admin. (2013). *Teori Ilmu Manajemen dan Akuntansi*
<https://ilmumanajemendanakuntansi.blogspot.com/2013/02/pengertian-dan-jenis-jenis-pengawasan.html>
- Paat, H. P., Nangoi, G. B., & Pusung, R. (2019). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Tomohon. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(3).
- PEMERINTAHAN KOTA BLITAR TAHUN 2017* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Putra, Iwan Setya. (2018). *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi*
<https://journal.stieken.ac.id/index.php/peta/article/view/337/440>
- Samidar. (2017). *Efektifitas Pengawasan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Makasar*.
[3813-Full_Text.pdf\(unismuh.ac.id\)](3813-Full_Text.pdf(unismuh.ac.id))
- Savitri, Enni. (2020). *Penganggaran Perusahaan*
<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKewjCoevj6o2CAxVtZmwGHXnQA4sQFnoECCMQAQ&url=https%3A%2F%2Frepository.unri.ac.id%2Fbitstream%2Fhandle%2F123456789%2F9138%2FBAB%25207%2520ANGGARAN%2520KAS.%252067500rugethw-10.pdf%3Fsequence%3D9%26isAllowed%3Dy&usg=A0vVaw2gqDErGIDapF21GZgcSDV9&opi=89978449>
- Senastri, Khaula. (2021). *Anggaran Penjualan: Pengertian, Tujuan, dan Faktor yang Mempengaruhi Anggaran Penjualan* <https://accurate.id/akuntansi/anggaran-penjualan/>
- Senastri, Khaula. (2021). *Anggaran Produksi, Rencana Penting Perusahaan dalam Hal Produksi* <https://accurate.id/akuntansi/anggaran-produksi/>
- Wahyudiana, T. (2015). *Analisa Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah: studi kasus pada Pemerintah Kota Blitar* (Doctoral dissertation, STIE Kesuma Negara Blitar).
- Werimon, S. (2005). *Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)(Study Empiris Di Provinsi Papua)* (Doctoral dissertation, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro).
- Zunaidi, D. S. (2018). *ANALISIS PELAKSANAAN FUNGSI PENGANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM PENYUSUNAN APBD*